

TATA KELOLA PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN BERDASARKAN PENIMBUNAN ANAK SUNGAI DI KOTA PALEMBANG

Miftahul Azmi, Reni Rentika Waty

Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²

Email: Mfthlzm@gmail.com

ABSTRACT

The City of Palembang, as one of the largest cities in South Sumatra, faces challenges in managing urban growth and development. In the 1930s, the number of Musi River tributaries in Palembang reached 316. However, now the number is only 95 tributaries, so during the existence of Indonesia, Palembang has lost 221 tributaries due to land conversion. The purpose of this study is to determine the governance of urban development in Palembang City and to determine the impact on the community of the filling of tributaries on this governance. The type of research used in this study is descriptive research using a qualitative approach. The results of this study indicate that in Palembang City, the phenomenon of the need for land tends to continue to increase due to the increasing population growth, resulting in symptoms of land use competition and in the planning process, utilization and control of space utilization has not taken place as expected. This study also found the impact of the filling of tributaries such as flooding and water pollution.

Keywords: *Development of urban areas, Filling of tributaries, Palembang City.*

ABSTRAK

Kota Palembang yang sebagai salah satu kota terbesar di Sumatera Selatan, menghadapi tantangan dalam mengelola pertumbuhan dan pembangunan wilayah perkotaan. Tahun 1930-an, jumlah anak Sungai Musi di Palembang mencapai 316. Namun, kini jumlah tersebut tinggal 95 anak sungai, jadi selama Indonesia berdiri Palembang telah kehilangan 221 anak sungai akibat alih fungsi lahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola pengembangan wilayah perkotaan di Kota Palembang dan untuk mengetahui dampak bagi masyarakat atas penimbunan anak sungai terhadap tata kelola tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di kota Palembang fenomena kebutuhan terhadap lahan cenderung terus meningkat karena pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi sehingga melahirkan gejala persaingan penggunaan lahan dan pada proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini juga menemukan adanya dampak dari penimbunan anak sungai seperti banjir dan pencemaran air.

Kata kunci: Kota Palembang, Pengembangan wilayah perkotaan, Penimbunan anak sungai

LATAR BELAKANG

Wilayah urban atau wilayah perkotaan banyak mengalami permasalahan tentang tata ruang yang menyebabkan perkotaan tersebut tidak tertata dengan baik bahkan menjadi buruk. Penyusunan tata kelola yang terjadi di Kota Palembang sangat memprihatinkan karena kepadatan

penduduk yang terjadi tidak sebanding dengan tata ruang yang ada di Kota Palembang. Pengelolaan pembangunan yang tidak tertata dengan baik sehingga banyak masyarakat yang melakukan pembangunan secara liar. Jumlah penduduk yang meningkat di negara berkembang membawa dampak besar terhadap laju pertumbuhan dan tingkat kepadatan penduduk, serta mempengaruhi pemanfaatan ruang yang sudah ada. Kondisi ini terlihat dari pesatnya alih fungsi lahan akibat meluasnya aktivitas perkotaan hingga ke wilayah pinggiran (Krimasta, 2020).

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di kota Palembang secara otomatis memicu berbagai permasalahan. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan luas lahan yang tersedia untuk tempat tinggal menyebabkan terjadinya kepadatan. Salah satu dampak utamanya adalah persoalan hunian. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan penyediaan fasilitas umum turut berkontribusi pada menurunnya kualitas permukiman. (Cindy Oktaviola, 2022).

Kota Palembang sebagai suatu kota terbesar di Sumatera Selatan, menghadapi tantangan dalam mengelola pertumbuhan dan pembangunan wilayah urban. Berdasarkan budayawan Palembang, Djohan Hanafiah, pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1930-an, terdapat sekitar 316 anak Sungai Musi di Palembang. Namun, jumlah tersebut telah berkurang drastis, menyisakan hanya puluhan anak sungai, itupun sebagian besar dalam kondisi yang memprihatinkan. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Alam bahwasannya anak sungai musik sekarang tinggal 95 anak sungai, jadi selama Indonesia berdiri Palembang telah kehilangan 221 anak sungai akibat alih fungsi dan penimbunan.

Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan menyebabkan meningkatnya kepadatan bangunan yang tersebar secara tidak teratur, sehingga memberikan tekanan pada area sekitarnya, terutama di kawasan tepi air atau bantaran sungai. Penyebaran bangunan yang tidak terkendali ini berdampak pada munculnya pemukiman di sekitar bantaran sungai. Selain itu, tingginya harga lahan di perkotaan serta lemahnya kondisi ekonomi sebagian masyarakat mendorong warga untuk melakukan pemanfaatan terhadap lahan kosong, seperti bantaran sungai, dengan mendirikan permukiman yang tidak teratur (Muhammad Ananta Firdus, 2021).

Dalam Peraturan Walikota Palembang No. 55 Tahun 2014 tentang "Ketentuan Penataan Bangunan di Tepi Sungai", dijelaskan pada BAB II Pasal 4 bahwa jarak antara bangunan dan sungai ditentukan berdasarkan kedalaman sungai. Jika dalam nya sungai kurang 3 meter, maka jarak sempadan yang diperbolehkan adalah 10 meter. Untuk kedalaman antara 3 hingga 20 meter, sempadannya ditetapkan sebesar 15 meter. Sementara itu, jika kedalaman melebihi 20 meter, maka sempadan sungai yang diperbolehkan minimal 30 meter (Peraturan Walikota Palembang tahun 2014).

Diketahui bahwa terdapat larangan memanfaatkan bantaran sungai untuk aktivitas yang dapat mengurangi fungsi sungai sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, larangan mendirikan bangunan di kawasan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tepatnya pada Pasal 157 (Restu, 2021).

Penimbunan anak sungai tersebut bisa menimbulkan banjir besar besaran setiap tahunnya, Banjir terjadi perkiraan sekitar di akhir tahun atau di pertengahan tahun. Kawasan kelurahan silaberanti tersebut merupakan kawasan dataran rendah, sehingga jika terjadi hujan dan pasang tahunan airnya akan ditampung di anak sungai tersebut. Akan tetapi pada saat sekarang ini anak sungai tersebut sudah ditimbun dan dijadikan pemukiman oleh masyarakat Kelurahan Silaberanti tersebut. Sehingga jika air hujan mulai naik, dan pasang tahunan akan datang maka terjadinya peluapan air hingga ke jalanan raya dan air banjir juga sering masuk kerumah rumah warga. Masyarakat yang melakukan penimbunan anak sungai di Kelurahan Silaberanti Kota Palembang tersebut tidak mempunyai izin terhadap Pemerintah, dan juga masyarakat sekitar yang melakukan penimbunan tersebut tidak mempunyai sertifikat rumah, banyak masyarakat yang melakukan penimbunan tersebut tidak takut untuk digusur malahan banyak masyarakat yang merenovasi rumah itu menjadi rumah batu yang bagus.

Padahal jika pemerintah ingin membuat DAS (Daerah Aliran Sungai) atau pemerintah ingin mengambil alih anak sungai tersebut maka tidak adanya ganti rugi ke pihak rumah yang digusur karena mereka membangun anak sungai itu tidak mempunyai izin dan juga tidak mempunyai sertifikat rumah. Akan tetapi masyarakat masih berleha leha dan masih melakukan renovasi rumah karena tidak adanya tindak tegas dari pemerintah atas perilaku masyarakat terhadap penimbunan anak sungai tersebut.

Menurut warga Kelurahan Silaberanti menyatakan anak sungai musi (sungai aur) tersebut yang asal usul nya berjarak lebarnya sebesar 8 M, namun dengan adanya masyarakat pendatang baru yang tidak mempunyai sertifikat tanah atau rumah sehingga melakukan penimbunan anak sungai tersebut dengan dikit demi sedikit dan hingga kini habis sudah menjadi pemukiman. Penimbunan anak sungai musi yang terjadi di Kelurahan Silaberanti sangat mengkhawatirkan karena air sungai dan luapan air hujan yang seharusnya ditampung oleh anak sungai musi kini harus meluap ke jalanan dan merusak lingkungan. Meski telah mengetahui hal tersebut, warga sekitar masih acuh karena tidak ada nya sanksi tegas yang dilakukan oleh Pemerintah. Karena adanya persoalan ini peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hal ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu jenis penelitian untuk menemukan fakta melalui berbagai pertanyaan. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai variabel-variabel yang diteliti, serta mendeskripsikan situasi penelitian berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya dan relevan dengan topik Tata Kelola Pengembangan Wilayah Perkotaan di Kota Palembang. Penelitian ini berlokasi di Kota Palembang yang berfokus pada Kelurahan Silaberanti, penulis melakukan penelitian ini kurang lebih selama satu bulan, dengan sasaran Masyarakat serta Instansi Pemerintah yang terkait,

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada informan. Penelitian ini menyajikan penataan dan pengelolaan secara kualitatif melalui penjabaran dalam bentuk kalimat-kalimat yang menekankan pada keaslian data. Pendekatannya tidak menolak teori, tetapi berfokus pada fakta-fakta nyata yang ditemukan langsung di lapangan. (Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, 2020).

HASIL DAN DISKUSI

Pada hal ini, peneliti akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang akan menjadi bagian utama dari skripsi ini. Bagian ini akan membahas rumusan masalah. Pertama, yaitu bagaimana tata kelola pengembangan wilayah perkotaan di Kota Palembang, serta dampak bagi masyarakat atas penimbunan anak sungai terhadap tata kelola tersebut. Kedua permasalahan tersebut akan peneliti analisis menggunakan teori Urban Design yang dikemukakan oleh Jane Jacobs.

Tata Kelola Pengembangan Wilayah Perkotaan Di Kota Palembang.

Pemerintah Republik Indonesia telah merancang pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terarah, bertahap, dan berkelanjutan melalui pengembangan tata ruang dalam kerangka lingkungan hidup yang dinamis, namun tetap menjaga kelestariannya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi, saat ini. Perencanaan tata kelola wilayah menjadi suatu isu utama dalam perkembangan pembangunan daerah. Dengan laju perkembangan wilayah yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, masalah lingkungan dan tata ruang kota menjadi hal yang sangat penting dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang (Pratama, 2019). Dalam mengelola pengembangan wilayah, diperlukan desain tata kelola yang kompleks sebagai pedoman dalam proses pengembangan tersebut. Salah satu aspek penting dalam pengembangan wilayah adalah bagaimana pemerintah menetapkan tugas pokok dan fungsinya dalam mengembangkan wilayah tersebut (Rahmawati, 2024).

Pada pembahasan ini peneliti menggunakan teori Urban Design yang di kembangkan oleh Jane Jacobs, di dalam teori tersebut ada 3 dimensi dalam perancangan kota menurut Jane Jacobs antara lain Penggunaan lahan, ketersediaan SDM, efektivitas tata ruang (Gomez, 2022) berikut penjelasannya :

1. Penggunaan Lahan.

Perencanaan dan desain pengembangan kawasan perkotaan memiliki peran yang sangat krusial sebagai pengendali, rancangan pengembangan kawasan menjadi krusial untuk memberikan peraturan yang cocok dengan kondisi kawasan. Ini meliputi distribusi lahan untuk berbagai jenis fungsi dan aktivitas. Setiap proses pengembangan kota perlu disertai dengan perencanaan tata guna lahan. Meski demikian, perumusan rencana pengembangan kota kerap

menghadapi kendala akibat keterbatasan akurasi data di lapangan, yang dapat menyebabkan inefisiensi pada rancangan tersebut karena tidak aplikatif. Dampak dari rancangan yang tidak sesuai ini adalah munculnya dampak merugikan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di suatu area (nurlaili, 2018). Pemanfaatan lahan yang tidak tepat dapat menyebabkan perubahan pada struktur kota. Kawasan permukiman merupakan salah satu elemen paling menonjol dalam tata guna lahan di wilayah perkotaan. Ketidaksesuaian dalam penataan permukiman ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan kota, sehingga perlu menjadi perhatian utama dalam pengelolaan tata kota. Penimbunan anak sungai terjadi karena tidak teraturnya tata kelola perkotaan serta dengan adanya kebutuhan lahan dan lahan di sekitar pemukiman juga terbatas maka masyarakat memanfaatkan area anak sungai sebagai lahan tambahan untuk membangun rumah apalagi hal tersebut dilakukan juga karena faktor kurangnya pengawasan dari pihak Pemerintah setempat.

Penimbunan terjadi sudah dilakukan secara turun temurun yang di mulai pada tahun 1980-an dan yang melakukan pun awalnya hanya pendatang yang tidak mempunyai lahan di Kota Palembang. Berikut gambar peta sungai di kota Palembang pada tahun 1980 hingga sekarang.

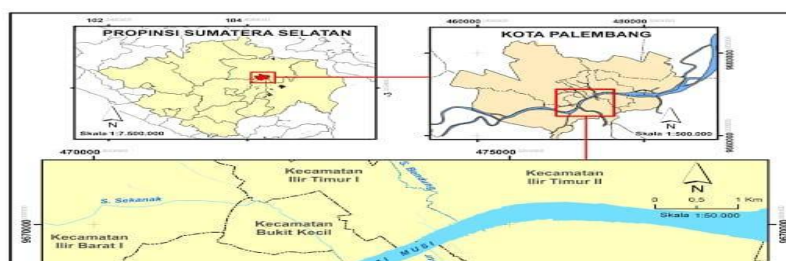
Gambar 1 Peta sungai tahun 1980-an.



Sumber: Palembang Musi

Bisa di lihat pada gambar peta sungai di atas bahwa pada tahun 1980 an masih banyak aliran anak sungai yang menyebar di Kota Palembang. Pada tahun itu sebenarnya sudah mulai terjadi penimbunan tapi masih beberapa dan belum terlalu kelihatan, akan tetapi dengan berjalannya waktu Palembang mulai mengalami transformasi dari kota perdagangan tradisional berbasis sungai menjadi kota modern yang menitikberatkan pembangunan daratan.

Gambar 2 Peta Sungai Musi tahun 2019



Sumber: (Mujib, 2019)

Berdasarkan peta sungai Kota Palembang di atas bahwasannya kita tahu bahwa anak sungai musi ada banyak sekali dulunya dan cenderung lebih besar akan tetapi perubahan yang sekarang sangat signifikan sebagian anak sungai ada yang menyempit bahkan menghilang, sangat disayangkan karena semakin kecil aliran tersebut maka dampaknya semakin besar terhadap lingkungan. Dan hal ini terjadi karena adanya keterbutuhan lahan yang membuat masyarakat berfikir untuk melakukan penimbunan.

Kota Palembang fenomena kebutuhan akan lahan terus mengalami peningkatan sejalan dengan kemajuan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk. Kondisi ini memicu terjadinya kompetisi dalam pemanfaatan lahan, yang mencerminkan prinsip dasar hukum permintaan dan penawaran. Hal ini wajar terjadi mengingat lahan merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan berkaitan erat dengan hampir seluruh aspek kehidupan serta pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan meluasnya wilayah, termasuk ekspansi perkotaan, permintaan terhadap lahan pun meningkat. Namun, dari sisi ketersediaan, luas lahan yang tersedia dalam batas wilayah administratif tetap terbatas..

Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk yang pesat serta meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai sektor akan memicu tingginya permintaan terhadap lahan. Kondisi ini mendorong terjadinya perubahan fungsi lahan yang membuat masyarakat melakukan penimbunan anak sungai demi memenuhi kebutuhan papan (tempat tinggal) nya. penimbunan anak sungai dilakukan karena keterbutuhan tempat tinggal, yang awalnya hanya membangun rumah panggung biasa di atas anak sungai sebagai tempat singgah namun karena belum ada tindak tegas dari pemerintah pada saat itu sehingga terjadilah penimbunan secara permanen hingga saat ini. Berikut kondisi rumah warga yang terdampak banjir karena melakukan penimbunan.

Gambar 3 kondisi rumah warga yang melakukan penimbunan



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Pada gambar di atas dapat menggambarkan tentang tata letak pemukiman masyarakat yang ada di Kelurahan Silaberanti, merupakan Pemukiman yang padat dan saling berhimpitan, dengan gang-gang sempit dengan lebar antara satu hingga dua meter, lorong tersebut berfungsi ganda sebagai jalur akses keluar-masuk rumah dan juga menjadi tempat terjadinya interaksi sosial antarwarga., pemukiman sering terjadi banjir sehingga kawasan selalu terkesan kumuh. Kondisi kumuh berasal dari rusak nya sistem penggunaan lahan karena berdasarkan gambar diatas bahwa banyak masyarakat yang melakukan penimbunan terhadap anak sungai sehingga menyebabkan banjir dan pemukiman juga menjadi semrawut.

2. Ketersediaan SDM

Ketersediaan sumber daya manusia yang profesional untuk kebutuhan perkotaan adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan. Sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas adalah individu yang menguasai, pengetahuan, kompetensi, dan etika yang sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat perkotaan (Sulistianingsih, 2019). Sumber daya manusia yang profesional dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, inovasi, dan daya saing di perkotaan. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional untuk kebutuhan perkotaan, diperlukan perencanaan yang baik dan terintegrasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam tata kelola perkotaan sangat penting untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan kota yang berkelanjutan. SDM yang berkualitas akan mempengaruhi efektivitas kebijakan, perencanaan, dan implementasi berbagai program di tingkat kota.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia turut menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perkotaan, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh para staf kelurahan. Dapat kita ketahui bahwa dalam masalah ini belum ada Koordinasi serta kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan

masyarakat sangat diperlukan, mengingat adanya perbedaan sudut pandang antara keduanya terkait penimbunan anak sungai ini memperjelas bahwa dalam penerapan kebijakan masyarakat sangat kurang keterlibatannya. Selain masyarakat kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan perkotaan yang baik. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah sama-sama mempunyai peran aktif dalam membangun tata kelola perkotaan sehingga terciptanya penataan kota yang tertata rapi dengan memastikan bahwa kebijakan kota lebih inklusif dan mencakup kebutuhan berbagai kelompok.

3. Efektivitas Tata Ruang

Konsep tata ruang secara umum terkait erat dengan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara khusus, konsep ini berfokus pada pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darto, 2018). Pemanfaatan ruang yang tepat, efektif, dan efisien dapat mengurangi kecenderungan Pemerintah PUPR menerapkan Peraturan Menteri ATR/BPN No.5 tahun 2024 sebagai landasan peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang ditetapkan pada 20 februari 2024 dan diundangkan pada 27 februari 2024 (Peraturan Menteri tahun 2024).

Penyusunan rencana tata ruang hingga saat ini masih belum dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Secara umum, implementasi rencana tata ruang di lapangan juga belum dijalankan secara tegas regulasi yang mengatur pemanfaatan lahan dan ruang kota dalam berbagai kondisi seringkali hanya menjadi formalitas dalam kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan wilayah perkotaan. Padahal, penataan ruang memegang peranan vital dalam meningkatkan kualitas hidup warga serta menunjang sektor ekonomi melalui pemanfaatan ruang yang aman, tertib, nyaman, dan selaras. Berikut pada gambar 4 yang menggambarkan kondisi rumah warga yang mendirikan rumah di sempadan sungai.

Gambar 4 Mendirikan rumah di sempadan sungai



Sumber : dokumentasi penulis, 2025

Gambar di atas dapat membuktikan bahwa pengimplementasian kebijakan pemerintah belum dilakukan secara merata masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran atas aturan

tentang mendirikan rumah sempadan sungai padahal hal tersebut sudah di atur dalam Peraturan Walikota Palembang.

Dalam pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk mencapai ketiga aspek tersebut, pelaksanaan pembangunan perlu berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Ardhana, 2024). Dalam proses perancangan tata kota, berbagai tantangan dapat muncul akibat Keterlibatan berbagai pihak atau stakeholder terbagi menjadi tiga kategori: stakeholder primer, stakeholder kunci, dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah kelompok yang merasakan dampak langsung dari suatu rencana, baik dampak positif maupun negatif, dan memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan—dalam hal ini adalah masyarakat yang terkena dampak. Stakeholder kunci adalah pihak yang memiliki otoritas legal untuk mengambil keputusan, yaitu pemerintah. Sedangkan stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak terdampak secara langsung, namun tetap menunjukkan kepedulian serta berperan penting dalam proses pembangunan, seperti lembaga swasta, institusi perbankan, LSM (lembaga swadaya masyarakat), dan pihak pendukung lainnya (Nurlaili, 2018).

Dampak Bagi Masyarakat Atas Penimbunan Anak Sungai Terhadap Tata Kelola Perkotaan.

Penimbunan anak sungai memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap tata kelola perkotaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek mulai dari lingkungan, social maupun ekonomi. Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan staff bagian Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang mengatakan bahwa adapun dampak bagi masyarakat yang melakukan penimbunan anak sungai terhadap tata kelola yaitu :

1. Banjir

Faktor utama penyebab banjir di kota Palembang disebabkan oleh aliran air yang tidak terkendali air yang terhambat, yang disebabkan oleh penimbunan anak sungai, tingginya curah hujan, aliran air yang datang dari Sungai Musi, pompa yang tidak berfungsi, Sampah yang terdapat di sungai dan posisi drainase yang tidak tepat (Saut Sagala, 2020). Masalah utama banjir di kota Palembang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan basah menjadi lahan kering untuk pembangunan. Awalnya, banjir hanya terjadi di daerah pinggiran kota yang mayoritasnya berupa rawa dan anak sungai. Namun, dengan adanya reklamasi lahan di wilayah rawa tersebut, daerah tersebut menjadi rentan terhadap banjir dan berubah menjadi dataran banjir yang baru. Tingginya kerentanan kawasan perkotaan terhadap banjir disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, seperti laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemajuan ekonomi, kerusakan lingkungan, serta urbanisasi yang tidak dibarengi dengan perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat, telah memicu munculnya kawasan permukiman

kumuh di dataran banjir. Selain itu, tingginya kepadatan permukiman tanpa area resapan air serta sistem drainase yang kurang memadai menjadi sejumlah faktor yang memperbesar potensi terjadinya banjir.

Suatu bencana banjir biasanya disebabkan oleh pemanfaatan anak sungai yang di salah gunakan oleh beberapa oknum masyarakat sehingga jumlah anak sungai terhadap ketersediaan lahan semakin hilang seiring dengan upaya reklamasi yang dilakukan setiap tahunnya, sementara siklus air di kota Palembang terhambat karena banyak anak sungai yang tertutup akibat penimbunan. Akibatnya, masalah yang muncul adalah ketidakseimbangan dalam pemanfaatan anak sungai di perkotaan, yang berdampak pada terganggunya siklus air dan menyebabkan degradasi wilayah serta lahan, yang pada gilirannya meningkatkan risiko banjir. Berikut beberapa tempat yang terdampak banjir di Kelurahan Silaberanti. Kondisi rumah warga yang terdampak banjir berikut pada gambar 5.

Gambar 5 Kondisi yang terdampak banjir di Kelurahan Silaberanti



Sumber : Dokumentasi penulis, 2025.

Berdasarkan gambar di atas adalah rumah warga yang mengalami banjir akibat dampak dari penimbunan anak sungai yang terjadi, “kondisi banjir tergenang di dalam rumah hingga ke jalanan, banjir juga bisa sampai lutut orang dewasa” ucap masyarakat Kelurahan Silaberanti. Permukiman kumuh yang berada di sepanjang tepi sungai berpotensi menghambat kelancaran aliran air. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat semestinya menyebabkan banyak dari mereka membuang limbah langsung ke sungai, fenomena ini umum terjadi di kota-kota besar. Akibatnya, aliran air menjadi tersumbat sehingga permukaan air banjir naik. Sampah organik maupun non-organik yang dibuang ke sungai menyebabkan penumpukan, yang akhirnya mengakibatkan pendangkalan atau timbunan di alur sungai.

2. Pencemaran Air

Dulunya sungai di Kota Palembang digunakan sebagai jalur transportasi menuju daerah pelosok, kini telah mengalami banyak perubahan, di antaranya menjadi saluran drainase dan

sarana penampung banjir. Sementara itu, anak-anak sungai berfungsi yang sebelumnya berperan sebagai daerah penampung air, banyak area yang kini telah ditimbun untuk keperluan sosial, sehingga beralih fungsi menjadi pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi lainnya. Sedimentasi sungai menjadi faktor penyebab pendangkalan atau penyempitan sungai.

Aliran air perlu diatasi agar sungai tetap dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya bergantung pada kualitas air agar bisa untuk memastikan agar air dapat digunakan secara berkelanjutan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, diperlukan adanya langkah-langkah pelestarian dan pengendalian. Upaya pelestarian kualitas air bertujuan untuk menjaga fungsi air agar tetap memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan bertujuan untuk mempertahankan fungsi air sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Sebagai elemen penting dalam lingkungan hidup, air saling mempengaruhi dengan komponen lainnya. Kualitas air yang buruk dapat merusak lingkungan, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan manusia dan keselamatan makhluk hidup lainnya.

Penurunan kualitas air saat ini disebabkan karena adanya sedimentasi sungai yang menyebabkan penyempitan daya tampung air serta menurunkan kekayaan sumber daya alam sehingga terjadinya peluapan air yang besar mengakibatkan pencemaran air. Air, sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat vital, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Ini berarti penggunaan air untuk berbagai keperluan harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Di satu sisi, aktivitas manusia membutuhkan air yang bermanfaat, namun di sisi lain, hal tersebut berisiko menimbulkan efek merugikan, seperti pencemaran yang dapat mengganggu ketersediaan air, efektivitas penggunaannya, kemampuan daya dukung, kapasitas penampungan, serta produktivitasnya. Untuk memastikan air tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mendukung kelangsungan pembangunan, diperlukan pengelolaan kualitas air serta upaya pengendalian terhadap pencemaran air harus menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan. Penimbunan anak sungai terhadap tata kelola pengembangan wilayah perkotaan dapat dikatakan bahwa Pemerintah PUPR sudah memiliki peran aktif dalam menangani masalah penimbunan anak sungai yang melibatkan edukasi terhadap sosialisasi, serta penyusunan regulasi, tindak tegas yang dilakukan pihak PUPR sudah benar karena penimbunan anak sungai secara ilegal sangat berdampak besar bagi masyarakat sekitar selain banjir juga bisa merusak ekosistem dan pencemaran air sehingga semakin banyak tumbuhnya penyakit hal tersebut dapat bisa dicegah mulai dari kesadaran diri masyarakat terlebih dahulu.

Untuk pemerintah serta instansi terkait, dalam penyusunan tata kelola perkotaan dapat memperhatikan tentang keterbutuhan masyarakat dalam menyediakan tempat tinggal bersubsidi yang baik agar terciptanya tata kelola perkotaan yang tersusun dan teratur. Maka dari itu untuk mencapai tata kelola perkotaan yang baik harus dilakukan kerjasama serta partisipasi antara masyarakat dan pihak pemerintah yang dilakukan secara transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terkait.

KESIMPULAN

Pada hasil penelitian yang dilakukan penulis yang membahas tentang tata kelola pengembangan wilayah perkotaan berdasarkan penimbunan anak sungai di kota Palembang maka dapat disimpulkan bahwa Dalam perencanaan tata kelola kota, hal yang harus disadari adalah objek perencanaan, seperti beberapa tempat di kota Palembang yang terbilang kumuh karena faktor dari penimbunan anak sungai, karena kawasan yang ditimbun akan terlihat genangan becek.

Mereka yang melakukan penimbunan anak sungai memang pendapatannya yang cukup rendah sehingga tak mampu membeli perumahan yang layak. Di kota Palembang fenomena kebutuhan terhadap lahan cenderung terus meningkat karena pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi sehingga melahirkan gejala persaingan penggunaan lahan, tahapan perencanaan, penggunaan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum berjalan secara optimal sesuai dengan harapan bahkan dalam hal ini masih belum ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Dampak dari penimbunan anak sungai terhadap tata kelola perkotaan adalah pertama, banjir yang disebabkan oleh perubahan alih fungsi lahan basah menjadi lahan tertutup (kering) untuk pembangunan. Kedua, pencemaran air karena adanya sedimentasi sungai dan pembuangan sampah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pendangkalan atau penyempitan aliran sungai sehingga air bersih sudah tidak ada di area sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, V. Y. (2024). Konsep smart city dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. *journal of computer science and information technology (JCSIT)*, 71-73.
- Darto. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah UNIKOM*, 265.
- Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan kalijaga.
- Gomez, I. (2022). Jane Jacobs memuat ulang :operasional kontemporer vitalitas perkotaan di sebuah distrik di Barcelona. *Jurnal Hompage*, 123.
- Hasan, N. a. (2023). analisis galian dan timbunan serta biaya pada proyek normalisasi kali lamong menggunakan metode cross section. *Universitas gresik* , 8.

- Husnah. (2018). APLIKASI MEMBRAN KERAMIK BUATAN DENGAN PRETREATMENT PADA PENJERNIHAN ANAK SUNGAI MUSI. *Jurnal Reoks* 3, 1.
- Imelda. (2023). Identifikasi pusat pertumbuhan dan daera hinterland Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi pembangunan*, 54-66.
- Krimasta, V. (2020). Kajian transformasi wilayah Peri Urban di Kota Manado. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, 1.
- Menteri, P. no 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia ATR/BPN No.5 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang
- Muhammad Ananta Firdus, R. R. (2021). Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai di Kota Banjarmasin. *jurnal Ius Constituendum*, 424-441.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, S. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mujib, M. A. (2019). Aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk identifikasi perubahan sempadan Sungai Musi di Kota Palembang. *Jurnal Nasional Pendidikan*, 5.
- Nurlaili, H. m. (2018). Tata Kelola Pemukiman Nelayan di Wilayah Perkotaan Pesisir Utara Jakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8-13.
- Nurlaili, H. M. (2018). Tata kelola pemukiman nelayan di wilayah perkotaan pesisir Utara Jakarta. *Jurnal Balitbang*, 9.
- Palembang, W. (2014). Peraturan Walikota Palembang tahun 2014 tentang *Penataan Bangunan di Tepi Sungai*
- Rahmawati, P. (2024). Politik tata kelola dalam pengembangan wilayah. *ilmiah ilmu pemerintahan*, 68-70.
- Restu, E. (2021). Penegakkan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sempadan perspektif siyasah dusturiah (studi kasus di bantaran sungai Amin Kabupaten Lebong). *UIN Fatmawati sukarno*, 7.
- Saputra, H. S. (2020). Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance di desa Kalibel Kabupaten Kediri. *Politik Muda*, 2.
- Sulistianingsih, E. (2019). Membangun sistem sumber daya manusia berbasis kompetensi dan profesional. *Jurnal Mitra Lampung*, 27.